



Media Pembelajaran *Hidden Curriculum* terhadap Pendidikan Anti Korupsi

Hidden Curriculum Learning Media on Anti-Corruption Education

Dian Indriana Hapsari*, St. Dwiarto Utomo & Entot Suhartono

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Dian Nuswantoro, Indonesia

Diterima: 25 April 2020; Disetujui: 20 Juni 2020; Dipublish: Desember 2020

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran media pembelajaran *hidden curriculum* terhadap pendidikan antikorupsi. Masalah difokuskan pada tingkat ketertarikan mahasiswa terhadap isu pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia melalui *hidden curriculum* antikorupsi yang diberikan dalam perkuliahan. Data-data dikumpulkan menggunakan teknik wawancara dengan sampel mahasiswa S1 semester akhir, observasi, dan dokumentasi dan dianalisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa media pembelajaran *hidden curriculum* terhadap pendidikan antikorupsi diberikan dalam materi kuliah dan disikapi secara berbeda-beda oleh setiap mahasiswa. Kajian penelitian ini menyimpulkan bahwa sebagian besar mahasiswa tertarik dengan permasalahan korupsi dan mendukung pemberantasan korupsi. Kendala yang dihadapi adalah kurangnya kemampuan mahasiswa dalam mengorganisasi diri terhadap pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Kata kunci: *Hidden curriculum*, Pendidikan, Korupsi.

Abstract

The purpose of this study is to find out about the role of hidden curriculum learning media regarding the anticorruption education. The problem is focused on the level of undergraduate student's interest in prevention and eradication of corruption in Indonesia through anticorruption hidden curriculum taught at college. Datas are collected by interview with final semester undergraduate students as the sample, observation, and documentation technique to be analyzed qualitatively. The result of this study shows that hidden curriculum as learning media regarding anticorruption education is taught and responded differently by each students. It is concluded that most students are interested in the corruption problem and support the efforts to eradicate corruption. The obstacle is the lack of student ability to organize regarding to prevent and eradicate corruption.

Keywords: *Hidden curriculum, Education, Corruption.*

How to Cite: Hapsari, D.I., Utomo, St.D., Suhartono, E. (2020). Media Pembelajaran Hidden Curriculum terhadap Pendidikan Anti Korupsi. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial, 12 (2): 417-423.*

*Corresponding author:

Email: dian.indriana@yahoo.com

ISSN 2085-482X (Print)

ISSN 2407-7429 (Online)

PENDAHULUAN

Salah satu berita menyedihkan tentang Indonesia adalah bahwa Indonesia menempati urutan ke-89 dari seluruh negara di dunia berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia. Hingga saat ini, korupsi masih menjadi salah satu persoalan yang belum dapat diatasi oleh pemerintah (Verawaty, Puspanita, & Sularti, 2019). Revisi Undang Undang mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengundang kontroversi cukup tajam di masyarakat. Salah satunya ditunjukkan dengan aksi demonstrasi yang dimotori oleh mahasiswa. Demonstrasi mengusung topik utama penolakan terhadap revisi Undang-Undang KPK. Kekhawatiran publik adalah apabila UU-KPK direvisi, maka proses pelemahan terhadap upaya pemberantasan korupsi akan terjadi, sehingga kecenderungan korupsi akan marak kembali (Muttaqin & Susanto, 2018). Sekalipun aksi penolakan dikemukakan oleh banyak pihak, akhirnya revisi UU-KPK tetap disahkan oleh Pemerintah Bersama dengan Dewan Perwakilan rakyat.

Pasalnya, korupsi diibaratkan dengan penyakit kanker darah yang menuntut penderitanya untuk selalu cuci darah agar tetap hidup (Setiadi, 2018). Desakan dan perlunya dilakukan pemberantasan korupsi inilah yang harus digaungkan terus, khususnya kepada mahasiswa yang mempunyai potensi sebagai pemimpin di masa mendatang. Perilaku kerja jujur dan bersih serta tidak koruptif inilah yang harus disiapkan sejak mahasiswa.

Menjelang tutup tahun 2019 Indonesia dihebohkan dengan kasus korupsi yang terjadi pada PT. Jiwasraya dengan total kerugian negara sebesar 13,7 trilyun dimana dalam kasus ini diindikasikan karena adanya *fraud* dalam manajemen korporasi. Selain itu masih ada cukup banyak kasus korupsi dengan nilai kerugian negara yang cukup fantastis. Misalkan saja kasus ASABRI dengan kerugian sekitar 10 Trilliun. Bank Century

(7 Trilliun), Pelindo II (6 trilliun), Kotawaringin (5,8 trilliun), BLBI, E-KTP dan Hambalang (Dzulfaroh, 2020).

Melihat fakta-fakta tersebut, diketahui bahwa proses kehidupan dan kondisi lingkungan di sekitarnya dalam mendapatkan nilai-nilai yang diperoleh saat ini masih mempengaruhi persoalan moral dan etika (Hudiarini, 2017). Apabila suatu pangkat dan kepercayaan dari masyarakat didapatkan melalui cara-cara yang salah, maka yang muncul yakni penyelewengan, penyimpangan, dan lain sebagainya. Maka dari itu, dibutuhkan sebuah upaya sebagai solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Putus asa untuk menegakkan nilai kebenaran merupakan tindakan yang tidaklah benar. Selain itu, kejujuran dalam setiap kegiatan yang dilakukan harus senantiasa dijunjung dan diamalkan dengan sebenar-benarnya.

Istilah korupsi bersumber dari kata "*corruptio*" atau "*corruptus*" yang merupakan bahasa Latin dan bermakna kebobrokan atau kerusakan (Samidan, 2011). Secara harfiah, korupsi dijabarkan sebagai suatu kondisi yang buruk, bejat, palsu, amoral, bisa disuap, menyimpang dari nilai kesucian dan hal-hal yang baik (Karsona, 2013). Seiring dengan perkembangan zaman, pengertian korupsi juga mengalami perkembangan makna, baik secara sosiologis maupun secara normatif.

Kehidupan masyarakat yang senantiasa berkembang dan perbuatan atau perilaku manusia yang semakin meluas di segala sektor kehidupan membuat banyaknya cakupan tindakan yang dapat digolongkan sebagai kategori tindakan korupsi. Definisi korupsi dijelaskan oleh Klitgaard (2001) di dalam karyanya yang berjudul "Membasmi Korupsi", yakni perilaku penyimpangan dari tanggung jawab-tanggung jawab suatu jabatan negara yang resmi dikarenakan memperoleh keuntungan berupa uang atau status yang berkaitan dengan kepentingan

pribadi, meliputi individu, kerabat atau keluarga, dan kelompok. Korupsi dapat disebut juga sebagai pelanggaran atas peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dengan mementingkan urusan atau tindakan pribadi. Pendapat tersebut didukung oleh definisi yang dikemukakan Unesco Courier (dalam Harahap, 2009) tentang korupsi, menurutnya korupsi berarti suatu praktik menyimpang dari tugas atau jabatan yang dipercayakan oleh publik kepadanya untuk kepentingan pribadi dan kelompok (*misuse of office for personal gain*). Demikian pula pendapat KPK yang mengemukakan bahwa korupsi yakni setiap tindakan yang diarahkan pada hal-hal yang dapat membuat masyarakat menanggung kerugian serta suatu perilaku demi menumpuk kekayaan untuk diri pribadi.

Ditinjau dari segi konseptual, kurikulum yakni serangkaian pengaturan dan rencana yang berisi tentang tujuan, substansi, serta materi pengajaran beserta metode yang diterapkan sebagai suatu panduan penyelenggaraan pembelajaran dalam menggapai tujuan pendidikan (Nasbi, 2017). Kurikulum tersembunyi atau *hidden curriculum* yakni kurikulum yang disampaikan secara terselubung sebagai dampak dari pendidikan di dalam maupun luar sekolah, khususnya hasil yang diperoleh dari materi yang dipelajari secara tersirat (Yahya, 2013). Sebagai contoh, unsur kebangsaan menjadi salah satu unsur yang senantiasa disematkan pada segala bentuk materi pendidikan. Kurikulum tersebut tidak tercantum dalam pedoman formal pengajaran seperti silabus namun pengajar kerap menyampaikannya di sela-sela pembelajaran untuk menanamkan jiwa nasionalisme.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan untuk menyusun penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif. Menurut Sugiyono (2012) metode ini adalah penelitian yang dipakai dalam meneliti pada keadaan objek

alamiah yang mana peneliti bertindak sebagai instrumen kunci. Deskriptif yakni pengumpulan data diperoleh dari penjelasan subjek penelitian, observasi, dan sumber dokumen.

Sementara itu, pendekatan yang dipakai pada penelitian ini yakni pendekatan sosiologi kurikulum, yakni *hidden curriculum*. Menurut Hidayat (2011), *hidden curriculum* dipandang sebagai praktik pendidikan yang memiliki tujuan, dampak, dan terus berlangsung baik di dalam maupun di luar kelas. Pada intinya, *hidden curriculum* disampaikan kepada peserta didik secara tersembunyi di sela-sela materi yang berdampak pada perspektif peserta didik dalam menilai sesuatu, baik disadari maupun tidak.

Penelitian ini dilaksanakan di Universitas Dian Nuswantoro. Peneliti berperan sebagai instrumen kunci yang berarti bahwa peneliti harus melakukan interaksi secara langsung dengan subjek penelitian atau informan penelitian (Sugiyono, 2012).

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswa di Universitas Dian Nuswantoro, yang terdiri dari mahasiswa semester akhir yang telah menempuh magang yang mana diharapkan telah memiliki pengalaman bekerja sehingga telah memahami situasi pekerjaan di kantor. Pengambilan sampel di masing-masing tempat pelayanan, yaitu setiap Fakultas.

Pengambilan sampel dilakukan dengan cara pengambilan secara proporsional berdasarkan perbandingan jumlah mahasiswa. Pada penelitian ini, metode pengambilan sampel yang digunakan oleh peneliti adalah *nonprobability sampling* dengan *quota sampling*. Teknik tersebut dipilih karena merupakan metode yang praktis, mudah dan cocok untuk dilaksanakan serta murah secara ekonomis (Imran, 2017).

Data primer dikumpulkan melalui teknik pengamatan secara langsung dengan mengamati berbagai kegiatan akademis

yang dilakukan oleh mahasiswa, serta wawancara mendalam dengan mahasiswa sebagai subjek penelitian. Data sekunder diperoleh berdasarkan studi literatur yang terkait dengan permasalahan penelitian yang berupa data, dokumen, atau gambar.

Mengacu pada Matthew dan Michael dalam (Patilima, 2005), bahwa teknik analisis data dibagi menjadi tiga alur kegiatan yang terjadi di lapangan, yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Peneliti mengumpulkan data di lapangan untuk diorganisasi dan direduksi kemudian disajikan dalam format sistematis sehingga dapat ditarik kesimpulan atas persoalan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari 5 Fakultas yang ada pada Universitas Dian Nuswantoro, diambil responden yang memenuhi kriteria dari masing-masing fakultas, yaitu Fakultas Ilmu Budaya (FIB), Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Fakultas Ilmu Komputer (FIK), Fakultas Teknik (FT), Fakultas Kesehatan (FKes). Sampel responden diambil dari mahasiswa tingkat sarjana yang telah menempuh mata kuliah magang dan tidak mengambil sampel dari mahasiswa pascasarjana. Pertimbangannya adalah agar dari sisi usia responden lebih seragam dan telah memiliki pengalaman bekerja. Pertimbangan lain adalah tidak semua fakultas memiliki program studi pascasarjana.

Sisipan materi (*hidden curriculum*) menyangkut korupsi diberikan di sela-sela perkuliahan reguler mahasiswa semester 7. Pada semester 7 mahasiswa sudah mengikuti kuliah praktek dimana mahasiswa diperhadapkan pada suasana kerja dibidang ilmu nya dalam kondisi yang sesungguhnya. Wawancara terhadap responden dilakukan pada waktu longgar dan dibantu oleh tim pengambil sampel. Secara umum pada proses wawancara akan muncul berbagai sikap dari responden. Responden yang tidak tertarik membicarakan topik korupsi akan

mengalihkan atau menghentikan pembicaraan menyangkut korupsi sebelum wawancara berlangsung selama 3 menit. Sedangkan pada keadaan sebaliknya dimana responden menunjukkan minat yang sangat besar terhadap kasus korupsi dan pemberantasannya, responden bersedia membahas pada forum khusus yang lebih spesifik dan lebih formal menyangkut pemberantasan korupsi dan bersedia membuat Gerakan anti korupsi. Secara kualitatif, respon dari responden dapat dibagi menjadi 5 kategori, masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Kategori A, responden mengalihkan pembicaraan dan menunjukkan ketidak tertarikannya pada topik korupsi setelah wawancara berjalan kurang dari 5 menit. Responden juga cenderung pasif terhadap pembicaraan
2. Kategori B, responden mengalihkan pembicaraan dan menunjukkan ketidak tertarikannya pada topik korupsi setelah wawancara berjalan kurang dari 10 menit.
3. Kategori C, responden menunjukkan ketertarikannya pada topik korupsi setelah wawancara berjalan lebih dari 10 menit. Responden juga mampu menunjukkan kasus korupsi riil yang diketahui baik dari pengalaman selama kerja praktek, berita media massa maupun dari gossip yang ada dikalangan mahasiswa.
4. Kategori D, responden tertarik pada topik korupsi. Pembicaraan dihentikan oleh pengambil sampel karena berjalan hampir 30 menit. Selain mengetahui kasus kasus korupsi riil responden juga memberi usulan solusi penanganan kasus korupsi yang dia lihat.
5. Kategori E, responden tertarik pada topik korupsi. Responden bukan saja memberi usulan solusi penanganan kasus korupsi akan tetapi terlibat aktif dalam kampanye anti korupsi

Sebaran jumlah mahasiswa yang diwawancarai sebagai responden dan sikap

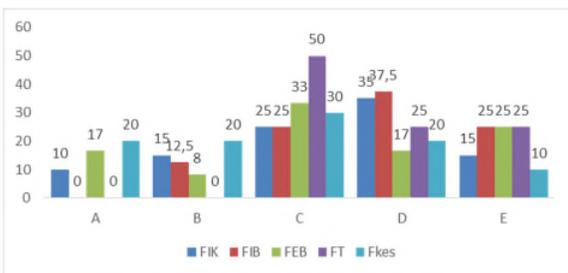
yang diambil dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Sebaran jumlah responden dan persikapannya terhadap topik korupsi

	A	B	C	D	E	Jumlah
FIK	2	3	5	7	3	20
FIB	0	1	2	3	2	8
FEB	2	1	4	2	3	12
FT	0	0	2	1	1	4
FKM	2	2	3	2	1	10

Sumber: Olahan peneliti (2020)

Responden dari Fakultas ilmu Komputer (FIK) mempunyai jumlah yang paling banyak, hal ini karena secara umum jumlah mahasiswa dari FIK juga cukup besar di Universitas Dian Nuswantoro. Karena jumlah responden berbeda beda untuk tiap-tiap fakultas, maka untuk pembahasan dibuat penyajian dari persentase masing-masing fakultas. Hasil perhitungan disajikan pada gambar 1.



Gambar 1. Grafik distribusi persepsi mahasiswa terhadap korupsi dan pencegahannya
Sumber Gambar: Olahan Peneliti (2020)

Dari gambar 1 terlihat untuk persikapan A, yaitu kelompok yang tidak peduli dengan kasus korupsi ada pada mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Ekonomi dan Bisnis serta Fakultas Kesehatan. Bahkan 20% responden dari Fakultas Kesehatan menunjukkan ketidakpeduliannya dengan kasus korupsi. Sementara dari data yang dihasilkan menunjukkan responden dari Fakultas Ilmu Budaya dan Fakultas Teknik setidaknya ada kepedulian terhadap permasalahan korupsi. Dari wawancara terungkap bahwa ada dua alasan utama

responden yang tidak peduli terhadap kasus korupsi yang pertama adalah mereka tidak melihat kasus korupsi di lingkungan hidup keseharian, sedangkan alasan lain justru kebalikannya yaitu adanya perasaan tidak berdaya di dalam mengubah keadaan yang koruptif. Sebagai contoh responden dari Fakultas Kesehatan yang sejak awal sudah banyak berlutut dengan masalah etika profesi yang mana menuntut banyak untuk menjaga kerahasiaan yang di sisi lain akan membawa dampak pada profesi yang digelutinya apabila etika dilanggar. Pada prakteknya proses menjaga etika profesi sering bersentuhan dengan senioritas dan senior sering menganggap sebagai pemilik kebenaran. Sehingga kesalahan yang dilakukan senior tidak boleh diungkap apalagi diekspos.

Pada kategori B, yaitu responden yang meninggalkan pembicaraan sebelum waktu 10 menit, tidak ada satu pun responden dari Fakultas Teknik yang melakukannya. Pada kategori ini responden dari Fakultas Kesehatan mempunyai persentase tertinggi dibandingkan responden dari Fakultas Kesehatan lainnya. Persentase mahasiswa Fakultas Kesehatan pada kategori B ini jumlahnya sama dengan pada kategori A.

Pada kategori C, secara umum responden pada masing-masing Fakultas menunjukkan kenaikan persentase. Kenaikan tertinggi terjadi pada responden dari Fakultas Teknik, dengan 50% responden yang masuk kategori ini. Sementara responden dari Fakultas lainnya berkisar antara 25% sampai dengan 33%. Hal ini sangat masuk akal karena dalam kehidupan keseharian responden dekat dengan sumber berita, baik media massa maupun media sosial. Sehingga topik korupsi sering mereka ketahui dan memulai pembicaraan mengenai korupsi tidaklah sulit untuk dilakukan. Hal ini juga terjadi karena adanya kecenderungan responden yang sungkan apabila dianggap tidak peduli dengan korupsi yang sangat mengganggu di dalam hidup bernegara.

Selanjutnya kategori D, yaitu kemampuan responden untuk mengungkapkan gagasan pencegahan dan penanganan korupsi dapat dilihat bahwa responden Fakultas Ilmu Komputer dan Fakultas Ilmu Budaya cukup besar persentasenya. Secara umum responden dari FIK cenderung mendukung penggunaan sistem komputasi dan keterbukaan informasi dalam proses yang berpotensi menciptakan peluang korupsi. Hal ini bisa dipahami karena bidang komputasi dan informasi adalah inti keahlian responden, sedangkan responden dari FIB cenderung menggunakan pendekatan perubahan budaya di dalam pemberantasan korupsi. Salah satunya adalah perubahan pencitraan bahwa pemimpin adalah raja. Pada jaman dulu raja identik dengan kekayaan dan kekuasaan, sementara paradigma baru yang diusulkan adalah pemimpin adalah pelayan masyarakat menuju kesejahteraan Bersama.

Kategori terakhir yaitu E yang mana responden juga menunjukkan aksi nyata di dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Pada kategori ini terlihat persentase sebesar 25% terdapat pada responden dari 3 Fakultas yaitu FIB, FEB dan FT. Persentase yang lebih rendah terdapat pada responden dari FIK dan FKes. Dari wawancara responden yang aktif di dalam Gerakan antikorupsi melakukan kegiatannya melalui aktivitas kemahasiswaan seperti Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), serta menjadi relawan pada berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Persentase responden dari FIK yang berkegiatan di bidang antikorupsi tidak sebanyak dari Fakultas lain karena mereka lebih sering kerja mandiri dan kurang mampu bergerak dalam organisasi, sedangkan responden dari Fakultas Kesehatan mengalami kekurangan waktu untuk berorganisasi karena kegiatan perkuliahan yang dianggap cukup padat.

Secara umum dapat dilihat bahwa sebagian besar responden tertarik dengan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Hal ini sangat wajar karena responden yang merupakan mahasiswa dan kaum muda masih hidup dalam idealisme. Hal baik yang seharusnya selalu dipupuk dan dikembangkan.

SIMPULAN

Dari penelitian terhadap pemberian *hidden curriculum* menyangkut upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi pada mahasiswa S1 semester akhir dapat disimpulkan bahwa sebagian besar mahasiswa tertarik dengan permasalahan korupsi dan menghendaki upaya pemberantasan korupsi untuk ditingkatkan karena latar belakang pendidikan responden yang merupakan mahasiswa lebih mendorong responden untuk menumbuhkan idealismenya. Idealisme tersebut membuat responden lebih peduli terhadap isu sosial di masyarakat, terutama korupsi. Kendala yang ada ialah kemampuan mahasiswa untuk mengorganisasi diri masih kurang, karena beban tugas kuliah yang memaksa responden untuk cenderung bekerja secara mandiri dan mengurangi waktu responden untuk berorganisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Dzulfaroh, A. N. (2020). Selain Jiwasraya, Berikut Kasus Korupsi Terbesar di Indonesia. *Kompas.com*. Retrieved from <https://www.kompas.com/tren/read/2020/01/17/070300165/selain-jiwasraya-berikut-kasus-korupsi-terbesar-di-indonesia?page=all>
- Harahap, H. M. (2009). *Ayat-Ayat Korupsi*. Yogyakarta: Gama Media.
- Hidayat, R. (2011). *Pengantar Sosiologi Kurikulum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Hudiarini, S. (2017). Penyertaan Etika bagi Masyarakat Akademik di Kalangan Dunia Pendidikan Tinggi. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 2(1), 1-13.
- Imran, H. A. (2017). Peran Sampling dan Distribusi Data dalam Penelitian Komunikasi Pendekatan Kuantitatif. *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, 21(1), 111-126.

- Karsona, A. M. (2013). *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Kemendikbud.
- Klitgaard, R. (2001). *Membasmi Korupsi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Muttaqin, L., & Susanto, M. E. (2018). Mengkaji Serangan Balik Koruptor terhadap KPK dan Strategi Menghadapinya. *Integritas*, 4(1), 101-144.
- Nasbi, I. (2017). Manajemen Kurikulum: Sebuah Kajian Teoritis. *Jurnal Idaarah*, 1(2), 318-330.
- Patilima, H. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Samidan, P. M. (2011). *Peranan Hakim dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Medan: Pustaka Press Bangsa.
- Setiadi, W. (2018). Korupsi di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15(3), 249-262.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Verawaty, Puspanita, I., & Sularti, E. (2019). Pengaruh BPK, Karakteristik Pemerintah dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah di Indonesia. *MBIA*, 18(2), 79-99.
- Yahya, M. S. (2013). Hidden Curriculum pada Sistem Pendidikan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto Tahun 2013. *Jurnal Kependidikan*, 1(1), 123-149.